



## 2023, Yogya Terima Danais Paling Besar



MERAPI-Humas Pemkot Yogyakarta

**Sekda Kota Yogyakarta Aman Yuriadjaya (kanan) saat menerima LHP atas dana keistimewaan dari Kepala BPK Perwakilan DIY Widhi Widayat di Yogyakarta, Rabu (28/12).**

**YOGYA (MERAPI)** - Pemerintah Kota Yogyakarta menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan atas pengelolaan Dana Keistimewaan untuk tahun anggaran 2018 hingga semester pertama 2022.

"Rekomendasi yang kami te-

rima dari hasil pemeriksaan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam upaya efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran untuk tahun yang akan datang," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Aman Yuriadjaya dikutip dari Antara di Yogya-

karta, Rabu (28/12).

Menurut Aman, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah berupaya semaksimal mungkin dalam mengelola dana keistimewaan yang diterima sesuai dengan aturan pemanfaatan yang berlaku dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai nomenklatur, dana keistimewaan tersebut ditujukan untuk menopang kegiatan yang menyangkut keistimewaan seperti urusan budaya, tata ruang, pariwisata, dan pendidikan.

Pemeriksaan BPK atas pengelolaan dana keistimewaan dilakukan dalam empat tahap diawali dengan pengumpulan data dan informasi pada pertengahan Agustus, pemeriksaan pendahuluan pada akhir Agustus hingga akhir September, pemeriksaan terinci pada awal Oktober dan diakhiri dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan.

Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki waktu 60 hari terhi-

tung sejak menerima laporan hasil pemeriksaan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diterima.

Pada tahun sebelumnya, Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi pemerintah daerah dengan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang cukup tinggi yaitu 94 persen.

Sedangkan pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengelola bantuan keuangan khusus (BKK) dana keistimewaan sebesar Rp 97,9 miliar atau naik signifikan dibanding tahun ini sebesar Rp 44,6 miliar.

Nilai dana keistimewaan yang akan dikelola Kota Yogyakarta pada tahun depan bahkan menjadi yang tertinggi dibanding kabupaten lain di DIY yaitu, Kulonprogo Rp 92,2 miliar, Sleman Rp 71,6 miliar, Gunungkidul Rp 61,7 miliar dan Bantul Rp 52,2 miliar.

Sementara itu, Kepala BPK

Perwakilan DIY Widhi Widayat mengatakan, pemeriksaan merupakan salah satu upaya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah, yaitu efektivitas anggaran agar sesuai perencanaan dan tepat sasaran.

"Harapannya, pemerintah daerah bisa menindaklanjuti rekomendasi yang kami sampaikan agar pengelolaan anggaran di tahun-tahun berikutnya semakin efektif," katanya.

Pemeriksaan efektivitas dana keistimewaan yang dilakukan BPK dilatarbelakangi beberapa hal, di antaranya genap satu dasawarsa keistimewaan DIY serta dorongan dari masyarakat agar dana keistimewaan dikelola secara transparan.

Dana keistimewaan, lanjut dia, ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat DIY sehingga pengelolaannya diharapkan dapat melibatkan seluruh pihak terkait. (\*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005